



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1180 TAHUN 2019

TENTANG

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengukur serta meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 perlu menetapkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
20. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1180 TAHUN 2019

PERJANJIAN KINERJA

UNIT SATUAN KERJA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN : 2019

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	1	Indeks Pembangunan Manusia	80,40
2	Berkurangnya tingkat pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,10%
3	Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	1	Indeks Ketahanan Pangan	Ketersediaan 100%, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) skor 82
4	Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat	1	Tingkat Kemiskinan	3,38%
5	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	1	Jumlah titik genangan banjir	7 titik
6	Meningkatnya akses sanitasi layak	1	Cakupan pelayanan air bersih	63,65%
		2	Persentase penurunan volume sampah di kota	17,00%
7	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (Public Transportation Modal Share)	22%
8	Meningkatnya pertumbuhan investasi	1	Realisasi Nilai Investasi	Rp. 100,20 triliun
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	1	Nilai/Predikat AKIP	Predikat A
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,00
		3	Opini Laporan Keuangan Daerah	Predikat WTP
10	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	1	Jumlah kawasan pemukiman kumuh	221 RW

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	94.463.838.570,00	APBD
2	Program Wajib Belajar 12 Tahun	3.223.798.909.085,00	APBD
3	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	105.331.497.916,00	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
4	Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	1.323.081.180.618,00	APBD
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	2.477.811.857.742,00	APBD
6	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	23.674.383.762,00	APBD
7	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan	73.878.539.533,00	APBD
8	Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah	1.668.245.947.000,00	APBD
9	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	2.913.233.413.828,00	APBD
10	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan	985.468.500.832,00	APBD
11	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	1.533.865.952.055,00	APBD
12	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Kesehatan	2.932.067.725,00	APBD
13	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih	108.541.528.628,00	APBD
14	Program Pengendali Banjir dan Abrasi	3.237.926.535.755,00	APBD
15	Program Penataan Kawasan Permukiman	568.790.322.804,00	APBD
16	Program Pelayanan Penghuni Rumah Susun	34.794.803.680,00	APBD
17	Program Penanganan Fakir Miskin	63.273.184.382,00	APBD
18	Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja	66.163.077.215,00	APBD
19	Program Penciptaan Hubungan Industrial yang harmonis	1.946.740.380,00	APBD
20	Program Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan perundangan di bidang Ketenagakerjaan	2.657.813.891,00	APBD
21	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	68.564.084.021,00	APBD
22	Program Pengelolaan Persampahan	2.639.771.840.713,00	APBD
23	Program Penataan Administrasi Kependudukan	150.419.771.896,00	APBD
24	Program Pemberdayaan Masyarakat	255.109.459.831,00	APBD
25	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum	345.964.650.264,00	APBD
26	Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan	105.060.050.085,00	APBD
27	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan	134.110.701.794,00	APBD
28	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik	155.060.928.362,00	APBD
29	Program Peningkatan Penanaman Modal	12.549.682.047,00	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
30	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	170.676.372.065,00	APBD
31	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	170.676.372.065,00	APBD
32	Program Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka	40.165.476.337,00	APBD
33	Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga	1.087.778.686.648,00	APBD
34	Program Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan	62.327.701.499,00	APBD
35	Program Pelayanan dan Pengembangan Kearsipan	28.318.433.999,00	APBD
36	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	152.294.221.841,00	APBD
37	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	164.267.510.737,00	APBD
38	Program Pengelolaan Pemakaman	437.917.650.933,00	APBD
39	Program Peningkatan Pelayanan Pemakaman	22.868.545.980,00	APBD
40	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	25.183.520.174,00	APBD
41	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan	435.550.000,00	APBD
42	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Kesra	570.500.000,00	APBD
43	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang SPKLH	200.700.000,00	APBD
44	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian	226.460.000,00	APBD
45	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.202.652.584,00	APBD
46	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.497.278.140,00	APBD
47	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi OPD Perencanaan Pembangunan Daerah	45.200.154,00	APBD
48	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan wilayah	11.627.900.889,00	APBD
49	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah	246.050.094.740,00	APBD
50	Program Pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	16.549.489.631,00	APBD
51	Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah	78.630.713.097,00	APBD
52	Program Pemanfaatan Aset Daerah	179.406.000,00	APBD
53	Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	5.718.582.942,00	APBD
54	Program pembinaan dan Pengembangan BUMD	8.503.432.216,00	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
55	Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	25.659.614.221,00	APBD
56	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	150.933.700,00	APBD
57	Program Peningkatan Layanan Mental Spiritual	10.689.335.463,00	APBD
58	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	12.454.630.597,00	APBD
59	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	7.271.468.287,00	APBD
60	Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	58.772.477.718,00	APBD
61	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat	3.328.828.862,00	APBD
62	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	190.184.405.302,00	APBD
63	Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	273.300.439.185,00	APBD
64	Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Utara	329.517.800.155,00	APBD
65	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Utara	3.395.949.821,00	APBD
66	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara	190.595.214.707,00	APBD
67	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur	317.623.759.816,00	APBD
68	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Timur	8.417.950.571,00	APBD
69	Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Timur	501.177.587.843,00	APBD
70	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat	5.343.689.451,00	APBD
71	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	259.278.639.871,00	APBD
72	Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Barat	397.156.158.813,00	APBD
73	Program peningkatan penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Selatan	5.612.439.582,00	APBD
74	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	250.039.518.506,00	APBD
75	Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	588.265.427.291,00	APBD



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN